



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 telah selesai disusun.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan selama kurun tahun anggaran 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 berisi pengukuran kinerja sasaran Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicapai Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Semoga LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Februari 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. AGUS KRISTIONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691225 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Ihtisar Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Visi Misi.....	1
1.3 Gambaran Umum Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo.....	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.5 Isu Strategis	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	8
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	11
2.3 Rencana Kinerja Tahunan.....	11
2.4 Perjanjian Kinerja (PK).....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.2 Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP	33
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Isu Strategis, Tujuan, Sasaran Strategis, dan IKU Perangkat Daerah	5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kab. Wonosobo.....	9
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
Tabel 2.3	Tolak Ukur Indikator Kinerja Utama.....	11
Tabel 2.4	Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.....	12
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Tahun 2022.....	13
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..	15
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Bakesbangpol Kab. Wonosobo tahun 2022...	16
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.....	17
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	18
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD	18
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	20
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	20
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD	21
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	22
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	22
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD	22
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	23
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	23
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD	23
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wonosobo	24
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran	26
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Pada Program Tahun 2022	27
Tabel 3.18	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	28

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum guna mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah “TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA”.

Melalui Misi ke 1: Mewujudkan Kehidupan Politik yang Demokratis dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat. Dan mendukung Program Unggulan : “ Wonosobo Aman”.

Untuk mendukung ketercapaian Misi I Bupati dan Wakil Bupati tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Wonosobo, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Wonosobo mempunyai tujuan sebagai berikut:

A. Tujuan

- 1) Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Pemenuhan hak-hak Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat

B. Sasaran

- 1) Meningkatnya partisipasi publik dalam politik
- 2) Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat
- 3) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan umum
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi

C. Indikator Tujuan/ Sasaran

- 1) Indeks Hak Politik
- 2) Indeks Toleransi
- 3) Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih
- 4) Persentase Penurunan Konflik Sosial
- 5) Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- 6) Nilai SAKIP

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo tahun 2022, dari tujuan dan sasaran, terdapat 4 sasaran dengan capaian realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi publik dalam politik, dengan indikatornya:

- Persentase peningkatan jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik. Capaian realisasi kinerja sampai akhir Desember 2022 adalah 136,70%.
 - Peningkatan cakupan masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan. Capaian realisasi kinerja sampai akhir Bulan Desember 2022 adalah 406,30%
 - Persentase organisasi masyarakat yang aktif. Capaian realisasi kinerja sampai akhir Bulan Desember 2022 adalah 82,17%.
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat, dengan indikatornya :
- Persentase penurunan konflik SARA. Capaian realisasi kinerja sampai akhir Bulan Desember 2022 adalah 0.00%, dikarenakan kasus konflik SARA pada tahun 2021 sama dengan tahun 2022 namun sudah terselesaikan.
 - Persentase penyelesaian kasus/ kejadian konflik SARA yang ditangani. Capaian realisasi kinerja sampai akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%
 - Persentase kasus/ kejadian potensi konflik sosial yang ditangani. Capaian realisasi kinerja sampai akhir Bulan Desember 2022 adalah 0.00%, tahun 2022 tidak ada konflik sosial.
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan umum, dengan indikatornya :
- Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian realisasi kinerja sampai akhir Bulan Desember 2022 adalah 74,1 %.
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi, dengan indikatornya
- Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 adalah 67,75 dengan artian interpretasi baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Kabupaten ke depan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo dalam perbaikan kinerja di waktu yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Wonosobo sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung pemerintah Kabupaten Wonosobo dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bakesbangpol membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah/ organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP harus menyajikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi SAKIP ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (*input oriented*) menjadi orientasi pada hasil (*result oriented*) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi.

LKjIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

1.2 Visi dan Misi

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo pada dasarnya mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

“Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut telah dituangkan ke dalam 5 (lima) Misi, yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan koperasi.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religious/ berkarakter, berbudaya, kreatif, melalui penyelenggaraan Pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan local dan perkembangan teknologi modern.
4. Mewujudkan pembangunan insfratuktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di amsa yang akan datang.

Berdasarkan misi tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo mengemban misi ke 1 (satu) yaitu Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Demokratis dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat.

Dan mendukung Program Unggulan : “Wonosobo Aman”

1.3 Gambaran Umum Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah, sedangkan fungsinya meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,

- sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibentuk dalam susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 2.1 Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 - 2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 3.1 Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 - 3.2 Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :

4.1 Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan

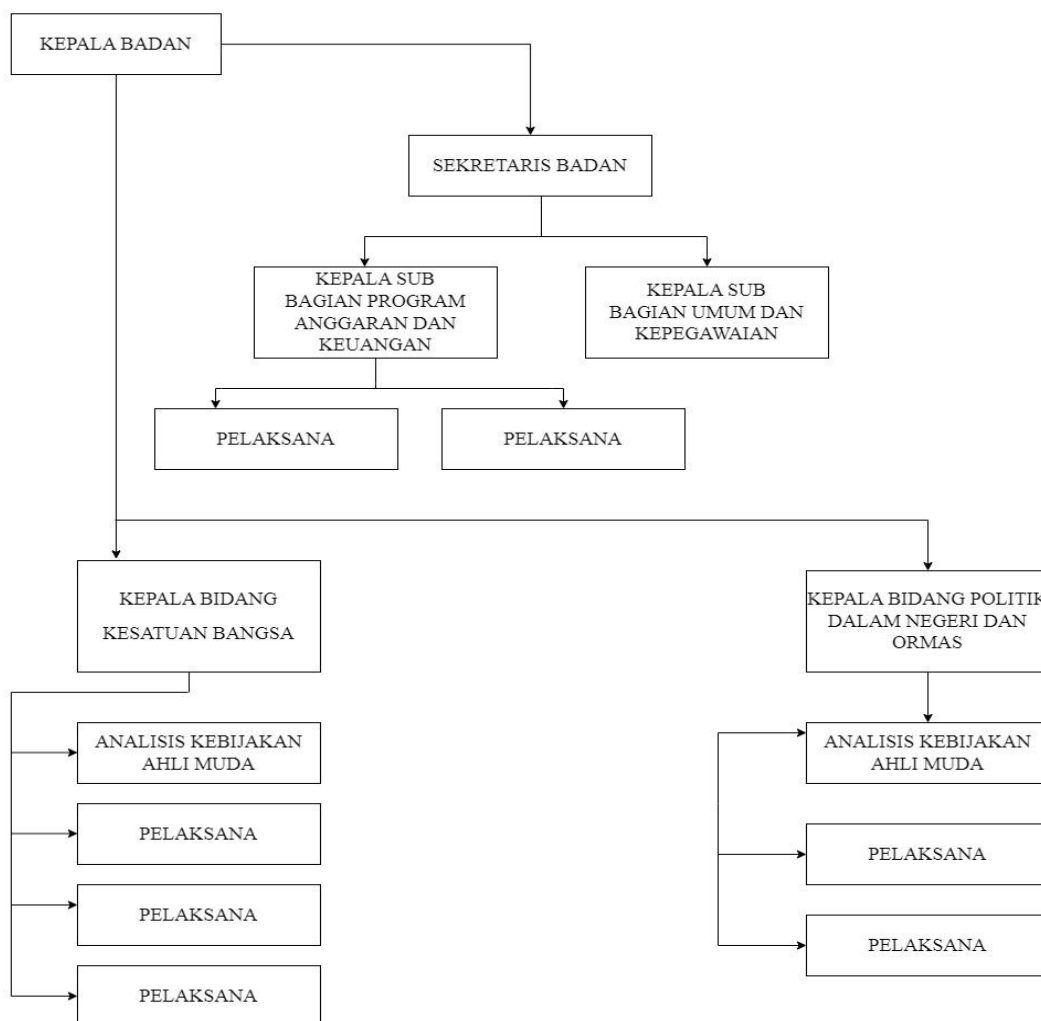
4.2 Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Kabupaten Wonosobo, terhitung mulai Bulan Desember 2021 bahwa jabatan Sub Bidang yang ada di bidang Kesatuan Bangsa dan bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas sudah tidak ada.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wonosobo tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO**



Berjalannya organisasi Bakesbangpol sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo disukung oleh 15 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

1.5 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan prioritas sesuai dengan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna mewujudkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan ditangani melalui rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Partisipasi politik cenderung menurun.
- b. Masih minimnya pendidikan politik bagi masyarakat.
- c. Masih adanya konflik sosial masyarakat.

Tabel 1.1 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran Strategis, dan IKU Perangkat Daerah

No	Isu Strategis	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Definisi Operasional
		Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Pemenuhan hak-hak Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Hak Politik	Indeks komposit yang dihitung dari hak memilih dan dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (hasil survei)
			Indeks Toleransi	Mengukur sikap dan Persepsi Masyarakat untuk menerima ,menghormati/menghargai perbedaan agama/ke yakinan
1	Menurunnya Partisipasi Politik Masyarakat			
		Meningkatnya Partisipasi Publik Dalam Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih	angka partisipasi pemilih tahun n dikurangi tahun n-1
2	Menurunnya Kerukunan, Toleransi dan Nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	Meningkatnya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	(konflik sosial tahun n dikurangi tahun n-1)/konflik sosial tahun n- 1*100%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Skor hasil survei pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan

		Umum		publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemen PAN-RB didasarkan 5 komponen yaitu : 1). perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi internal dan 5). Capaian kinerja.

1.6 Sistematika Penyusunan LKjIP

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026

Tahun 2022 merupakan tahapan perencanaan kerja yang ke-2 sebagai penjabaran kegiatan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026.

Renstra yang disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membunyai hubungan hirarki (*cascading kinerja*) dengan misi ke-1 Bupati dan Wakil Bupati yaitu Mewujudkan Kehidupan Politik yang Demokratis dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat dengan tujuan Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Pemenuhan hak-hak Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat. Sasaran yang dicapai adalah Meningkatnya partisipasi publik dalam politik, Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat, Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan umum dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penguatan pendidikan politik yang inklusi
- 2) Peningkatan karakter religius dan penguatan sinergi dalam memelihara keharmonisan kehidupan bermasyarakat
- 3) Peningkatan peran organisasi masyarakat sipil untuk penguatan karakter
- 4) Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini keamanan
- 5) Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan
- 6) Peningkatan perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal dan Capaian kinerja.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tahun 2022 merupakan tahapan ke-2 dalam satu masa periode pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo. Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran merupakan turunan visi dan misi Bupati Wonosobo dalam RPJMD 2021-2026. Agar pencapai tujuan dan sasaran jelas maka perlu dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator program dan indikator kegiatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik. IKU akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Antara tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan harus terdapat hubungan hirarkhis dan logis yang menggambarkan struktur kinerja yang sistematis (*cascading*-kinerja). *Cascading* kinerja merupakan hasil analisis perumusan *cascading*/pohon masalah yang menggambarkan masalah pokok, masalah, sub-masalah yang saling terkait dan bersifat strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. *Cascading* kinerja menjadi bahan penyusunan perencanaan strategis lima tahunan (Resntra) dan kegiatan pada setiap tahun (Renja). Dengan adanya *cascading* kinerja maka diharapkan setiap kegiatan mencapai *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Sesuai dokumen perencanaan maka tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Pemenuhan hak-hak Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat. Tujuan dan sasaran dapat dilihat pada

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
	Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Pemenuhan hak-hak Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Hak Politik		
			Meningkatnya partisipasi publik dalam politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih
		Indeks Toleransi		
			Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial
			Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan umum	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai SAKIP

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Pemenuhan Hak-hak Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya Partisipasi Publik Dalam Politik	Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	Penguatan Pendidikan Politik yang Inklusi
		Meningkatnya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatkan Toleransi Terhadap Keberagaman	Penguatan Sinergi dalam Memelihara Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat
				Peningkatan Peran Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan Karakter
		Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Kamtartibmas)		Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Keamanan
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan Umum	Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik untuk Kemudahan layanan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Peningkatan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Adapun tolak ukurnya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama yang tertera di tabel berikut:

Tabel 2.3 Tolak Ukur Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Partisipasi Publik Dalam Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih	Angka partisipasi pemilih tahun N dikurangi tahun N-1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	(konflik sosial tahun N-1)/ konflik sosial tahun N-1*100%	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan Umum	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Skor hasil survey pelayann publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemen PAN-RB didasarkan 5 komponen yaitu: 1). Perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja 4). Evaluasi internal dan 5). Capaian kinerja	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut:

Tabel 2.4 Tabel Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Meningkatnya partisipasi publik dalam politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih	angka	3,85
	Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Persen	100
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan umum	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	angka	82,5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai SAKIP	angka	64,5

2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja dapat juga disebut sebagai dokumen perencanaan tahunan yang pengesahannya setelah adanya penetapan anggaran (APBD). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya (*outcome* kumulatif), sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Rensta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026 terdapat 6 (enam) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

1. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
2. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
4. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Adapun Perjanjian Kinerja tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Tahun 2022

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (Output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah Dan Desa yang Profesional, Transparan, Bersih, dan Melayani	A. Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi B. Persentase Realisasi Belanja Modal Sarana dan Prasarana	99% 99%
2	Meningkatnya Toleransi dalam Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Pendudukan (Jumlah Tempat Ibadah/Jumlah Penduduk) X 1000	4,45%
3	Meningkatnya Nilai Demokrasi serta Kesadaran/Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara	Tingkat Partisipasi Pemilih	75%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	A. Persentase FKDM yang Aktif B. Persentase Lembaga Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Telah Berbadan Hukum Indonesia yang Mendapat Bantuan Pemerintah Daerah	85% 85%

		C. Angka Kriminilitas yang Tertangani	85%
--	--	--	-----

No	Program	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.578.405.757,-
2	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.005.750.000,-
3	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.341.600.000,-
4	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp. 170.000.000,-
5	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 199.692.000,-
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 631.259.500,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	Kategori
1	2	3
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo tahun 2022 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo. Pengukuran antara rencana kinerja yang

terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Bakesbangpol Kab. Wonosobo tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Publik Dalam Politik	Indeks Hak Politik	66,42			
		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Terhadap Pendidikan Politik	3,85	13.67	136.70	Sangat Tinggi
		Persentase Peningkatan Cakupan Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan	10%	40.63	406.30	Sangat Tinggi
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	82.17	82.17	Tinggi
2	Meningkatnya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Toleransi	79,50			
		Persentase Penurunan Konflik SARA	50	0.00	0.00	Sangat Rendah
		Persentase Penyelesaian Kasus/Potensi konflik SARA yang ditangani	100	100.00	100.00	Sangat Tinggi
		Persentase Kasus atau Kejadian Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	100	0.00	0.00	Sangat Rendah
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	74,1	74,1	Sedang

	Umum					
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai SAKIP	64,5	67,75		Sedang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 yang diukur maka capaian kinerja dikategorikan Baik. Secara lebih rinci, evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator perjanjian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 : Meningkatnya Partisipasi Publik Dalam Politik

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 4 indikator, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Partisipasi Publik Dalam Politik	Indeks Hak Politik	66,42		
		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Terhadap Pendidikan Politik	3,85	13.67	136.70
		Persentase Peningkatan Cakupan Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan	10%	40.63	406.30
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	82.17	82.17

Dari tiga indikator kinerja terlihat ada 2 kinerja yang tercapai yaitu Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Terhadap Pendidikan Politik dan Persentase Peningkatan Cakupan Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2022 dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut:

a. Perbandingan kinerja tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		%Capaian	
			2022	2021	2022	2021
	Indeks Hak Politik	66,42				
	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Terhadap Pendidikan Politik	3,85	13.67	10	136.70	10%
	Persentase Peningkatan Cakupan Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan	10%	40.63	10	406.30	10%
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	82.17	50	82.17	100%

Dilihat dari capaian tahun lalu bahwa terlihat bahwa 2 indikator kinerja lebih baik daripada tahun sebelumnya dan perlu adanya peningkatan capaian pada Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif.

b. Perbandingan antara realisasi Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2016-2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo memiliki indikator yang berbeda dengan indikator yang ada pada renstra 2021-2026 sehingga tidak dapat dibandingkan nilai capaian ataupun realisasinya.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RPJMD

Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2022	Target Akhir RPJMD
1	Indeks Hak Politik		
2	Persentase Peningkatan	13.67	3,85

	Jumlah Masyarakat Terhadap Pendidikan Politik			
3	Persentase Peningkatan Cakupan Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan	40.63		10%
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	82.17		100%

d. Analisis penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Berdasarkan beberapa data yang telah disebutkan sebelumnya bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 terdapat kinerja yang melampaui target.

- 1) Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Terhadap Pendidikan Politik

Realisasi mencapai 13,67 dari target 10 % dengan persentase capaian 136,70 %. Keberhasilan tersebut didorong faktor pendukung fasilitasi untuk partai politik dan kegiatan pendidikan politik memiliki anggaran yang cukup memadai.

- 2) Persentase Peningkatan Cakupan Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Realisasi mencapai 40.63 dari target 10% dengan persentase capaian 406.30 %. Keberhasilan tersebut didorong oleh faktor pendukung Peringatan Hari Besar Nasional digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan materi wawasan kebangsaan.

- 3) Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif memperoleh realisasi sebesar 82.17 capaian ini menuju arah positif mengarah ke target 100% dengan faktor pendukung adanya upaya pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk organisasi masyarakat yang belum aktif menjadi aktif. Dan upaya tindak lanjut untuk mencapai target ialah mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap organisasi kemasyarakatan.

e. Analisa Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pencapaian Persentase capaian sasaran kinerja Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Politik didukung dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya.

Pencapaian Persentase capaian sasaran kinerja Persentase Peningkatan Cakupan Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan didukung dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter.

Pencapaian Persentase capaian sasaran kinerja Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif didukung dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

2. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Toleransi	79,50		
		Persentase Penurunan Konflik SARA	50	0.00	0.00
		Persentase Penyelesaian Kasus/Potensi konflik SARA yang ditangani	100	100.00	100.00
		Persentase Kasus atau Kejadian Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	100	0.00	0.00

a. Perbandingan kinerja tahun sebelumnya

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		%Capaian	
			2022	2021	2022	2021
1	Indeks Toleransi	79,50				
2	Persentase Penurunan Konflik SARA	50	0.00	50	0.00	100
3	Persentase Penyelesaian Kasus/Potensi konflik SARA yang ditangani	100	100.00	100	100.00	100
4	Persentase Kasus atau Kejadian Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	100	0.00	100	0.00	100

b. Perbandingan antara realisasi Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2016-2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo memiliki indikator yang berbeda dengan indikator yang ada pada renstra 2021-2026 sehingga tidak dapat dibandingkan nilai capaian ataupun realisasinya.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RPJMD

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2022	Target Akhir RPJMD
1	Indeks Toleransi		87,00
2	Persentase Penurunan Konflik SARA	0.00	50
3	Persentase Penyelesaian Kasus/Potensi konflik SARA yang ditangani	100	100
4	Persentase Kasus atau Kejadian Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	0.00	100

d. Analisis penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Faktor pendukung keberhasilan persentase penyelesaian kasus/ potensi konflik SARA yang ditangani pada kasus yang terjadi di Desa Candiyan, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo terkait pembangunan tempat ibadah dan fasilitas lain berkaitan dengan kegiatan umat Nasrani ialah dilakukannya mediasi oleh Forkompimca, Bakesbangpol, tokoh agama dan masyarakat.

Sedangkan untuk persentase konflik SARA tidak tercapai karena kasus yang terjadi pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021. Dan mengenai Persentase Kasus atau kejadian Potensi Konflik Sosial yang ditangani realisasinya 0.00, karena pada tahun 2022 tidak terjadi atau tidak ada konflik sosial, ini adalah suatu keberhasilan atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta jajaran dan instansi terkait yang mendukung dalam menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang aman kondusif.

e. Analisa Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program yang menunjang keberhasilan sasaran strategis 2 yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan Umum

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	74,1	74,1

a. Perbandingan kinerja tahun sebelumnya

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		%Capaian	
			2022	2021	2022	2021
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	74,1	90	74,1	100

b. Perbandingan antara realisasi Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2016-2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo memiliki indikator yang berbeda dengan indikator yang ada pada renstra 2021-2026 sehingga tidak dapat dibandingkan nilai capaian ataupun realisasinya.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RPJMD

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2022	Target Akhir RPJMD
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,1	84,5

d. Analisis penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Realisasi capaian IKM pada tahun 2022 74,1 dari target tahun 2022 82,5, meski belum mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat, Bakesbangpol akan terus meningkatkan pelayanan publik.

e. Analisa Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indeks Kepuasan Masyarakat ditunjang dengan program penunjang urusan daerah.

4. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai SAKIP	65,76	67,75

a. Perbandingan kinerja tahun sebelumnya

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target Awal	Realisasi 2021
	Nilai SAKIP	64,5	67,75

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 skor nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo adalah 67,75.

b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	Target Akhir RPJMD
1	Nilai SAKIP	67,75	72,47

c. Analisis penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 adalah 67,75 yang melampaui target awal yaitu 64,5. Pemahaman tentang SAKIP diberikan pada tiap-tiap personil untuk membutuhkan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan masing-masing individu.

d. Analisa Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Nilai SAKIP ditunjang dengan program penunjang urusan daerah.

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wonosobo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (2021)	TARGET AKHIR TRENS TRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR TRENS TRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan cakupan masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan	10 %	40.63	406.30	10.00	10 %	40.63
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	10 %	13.67	136.70	10.00	10 %	13.67
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	100 %	82.17	82.17	100.00	100 %	82.17
	Meningkatnya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Persentase penurunan konflik SARA	50 %	0.00	0.00	50.00	50 %	0.00
		Persentase penyelesaian kasus/kejadian potensi konflik SARA yang ditangani	100 %	100.00	100.00	100.00	100 %	100.00
		Persentase kasus/kejadian potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	0.00	0.00	100.00	100 %	100.00

3.2 Realisasi Anggaran

Total Penyerapan Anggaran sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
5	Belanja	5.926.707.257,00	5.649.712.146,00	95,33	7.036.692.331,00
5.1	Belanja Operasi	5.926.707.257,00	5.649.712.146,00	95,33	6.899.964.731,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.271.577.997,00	2.034.107.026,00	89,55	1.676.778.598,00
5.1.02	Belanja Barang	2.410.729.260,00	2.371.205.120,00	98,36	2.041.270.133,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.244.400.000,00	1.244.400.000,00	100,00	3.181.916.000,00
5.2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	136.727.600,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	136.727.600,00
SURPLUS/ DEFISIT		(5.926.707.257,00)	(5.649.712.146,00)	0	(7.036.692.331,00)
SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN		(5.926.707.257,00)	(5.649.712.146,00)	0	(7.036.692.331,00)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 5.926.707.257,00 yang digunakan untuk melaksanakan 6 Program. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Pada Program Tahun 2022

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.341.600.000	1.337.403.000	99,69%
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.005.750.000	997.951.600	99,22%
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	170.000.000	164.901.000	97,00%

	Organisasi Kemasyarakatan			
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	199.692.000	199.242.000	99,77%
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	631.259.500	624.249.000	98,89%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.578.405.757	2.325.965.546	90,21%

Berdasarkan alokasi anggaran Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, komposisi pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan di lingkungan Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.18 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bakesbangpol
Kabupaten Wonosobon Tahun 2022

N o	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Penetapan APBD 2022	Anggaran Perubahan APBD 2022	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisa si Keuan gan (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Rp3.033.391.435	Rp2.578.405.757	2.325.965.546	90,21
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp 2.340.654.435	Rp 2.325.427.997	2.087.807.026	89,78
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.299.884.435	Rp 2.271.577.997	2.034.107.026	89,55
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verif ikasi keu SKPD	Rp 40.770.000	Rp 53.850.000	53.700.000	99,72
2	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Rp 500.000.000	-	-	-
	a. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Rp 500.000.000	-	-	-
3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp 51.764.000	Rp 71.764.000	69.618.798	97,01
	a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 13.265.500	Rp 13.265.500	12.845.000	96,83
	b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 3.701.550	Rp 3.701.550	3.666.300	99,05
	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	2.690.000	64,05
	d. Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 30.596.950	Rp 50.596.950	50.417.498	99,65

4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rp -	Rp -	-	
	a. Pengadaan Mebel	Rp -	Rp -	-	
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp -	Rp -	-	
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Rp 105.783.000</i>	<i>Rp 105.783.000</i>	96.582.222	91,30 %
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 900.000	Rp 900.000	900.000	100,00 %
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 20.883.000	Rp 20.883.000	14.873.642	71,22%
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 84.000.000	Rp 84.000.000	80.808.580	96,20%
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Rp 35.190.000</i>	<i>Rp 75.430.760</i>	71.957.500	95,40
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 15.000.000	Rp 22.020.000	19.495.500	88,54
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.190.000	Rp 5.190.000	4.715.000	90,85
	c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 15.000.000	Rp 48.220.760	47.747.000	99,02
B	Program	Rp 365.750.000	Rp	997.951.600	

	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1.005.750.000		99,22
1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Rp 365.750.000</i>	<i>Rp 1.005.750.000</i>	997.951.600	99,22
	1. Ziarah Kebangsaan	Rp 26.640.000	Rp 26.640.000	26.640.000	100,00
	2. Study Lab Kebhinekaan	Rp 49.296.000	Rp 49.296.000	48.668.600	98,73
	3. PPBN dan PKBN	Rp 40.269.000	Rp 40.269.000	40.269.000	100,00
	4. Fasilitasi hari besar Nasional	Rp 49.545.000	Rp 49.545.000	49.445.000	99,80
	5. Sosialisasi Ideologi Pancasila bagi kader angkatan muda Wonosobo / Pokir	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	195.948.000	97,97
	6. DED Kebangsaan		Rp 90.000.000	89.100.000	99
	7. Fasilitasi Hari Santri		Rp 100.000.000	99.530.000	99,53
	8. Fasilitasi HUT RI		Rp 50.000.000	49.800.000	99,60
	9. Fasilitasi Keagamaan		Rp 400.000.000	98.551.000	99,64
C	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.341.600.000	Rp 1.341.600.000	1.337.403.000	99,69
1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan</i>	<i>Rp 1.341.600.000</i>	<i>Rp 1.341.600.000</i>	1.337.403.000	99,69

	<i>Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 1.341.600.000	Rp 1.341.600.000	1.337.403.000	99,69
	1. Bantuan Keuangan Partai Politik	Rp 1.074.400.000	Rp 1.074.400.000	1.074.400.000	100,00
	2. Pendidikan politik untuk demokrasi pancasila / Pokir	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	196.553.000	98,28
	3. Bintek pengelolaan keuangan parpol	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	66.450.000	98,88
D	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 150.000.000	Rp 170.000.000	164.901.000	97,00
1.	<i>Perumusan Kebijakan</i>	<i>Rp 150.000.000</i>	<i>Rp 170.000.000</i>	164.901.000	97,00

	<i>Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>				
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 150.000.000	Rp 170.000.000	164.901.000	97,00
	1. Fasilitasi Pemberdayaan Kader Organisasi Masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam Kebhinekaan	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	144.901.000	96,60
	2. Hibah PWRI		Rp 20.000.000	20.000.000	100,00
E	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 149.692.000	Rp 199.692.000	199.242.000	99,77
1.	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Rp 149.692.000</i>	<i>Rp 199.692.000</i>	<i>199.242.000</i>	<i>99,77</i>
	1. Hibah FKUB	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	50.000.000	100,00
	2. Hibah MUI	Rp 50.000.000	Rp 100.000.000	100.000.000	100,00

	3. Penyuluhan Pencegahan, Peredaran Penggunaan Miras dan Narkoba (P4GN) dan Fasilitasi KAMA/KAPA	Rp 49.692.000	Rp 49.692.000	49.242.000	99,09
F	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 356.259.500	Rp 631.259.500	624.249.000	98,89
1.	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Rp 356.259.500</i>	<i>Rp 631.259.500</i>	624.249.000	98,89
	1.FGD Penanganan Konflik	Rp 60.009.500	Rp 60.009.500	59.100.000	98,48
	2. Fasilitasi Deteksi Dini dan Cipta Kondisi	Rp 197.600.000	Rp 472.600.000	470.781.500	99,62
	3. Fasilitasi Sinergitas Forkopimda Forkopimca	Rp 98.650.000	Rp 98.650.000	94.367.500	95,66

Berdasarkan informasi pada tabel 3.18, bahwa total anggaran perubahan APBD tahun 2022 sebesar Rp. 5.926.707.257,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 5.649.712.146,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 95,33%. Adapun realisasi anggaran yang rendah yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar 64,05 % dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 71,22%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian di atas, Laporan Kinerja Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2022. Laporan Kinerja Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

4.2 Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut:

Menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo seperti yang dijelaskan pada Bab I diatas maka strategi yang diperlukan guna meningkatkan

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo di masa mendatang antara lain yaitu :

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA.;
2. Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila.;
3. Pelaksanaan Perda P4GN melauai Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN.;
4. Pengawasan Ormas, Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Ormas.;
5. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Wonosobo.;
6. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama.;
7. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik.;
8. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.;
9. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.;
10. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo secara menyeluruh, efektif, dan efesien.;
- dan
11. Memperkuat komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan Kegiatan/Kinerja pada masa mendatang.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO



NIP. 19691225 199403 1 006